

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi suatu negara dapat berkembang melalui pembangunan ekonomi, sehingga dapat menghasilkan peningkatan pendapatan per kapita dan tingkat kemakmuran yang tinggi. Ketika berbicara tentang pembangunan ekonomi, ketimpangan pendapatan merupakan salah satu masalah yang tidak dapat dihindari. Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi Indonesia. Penyebab pertama ketimpangan pendapatan di Indonesia yaitu kurangnya kesempatan yang adil bagi keluarga miskin sejak awal. Kedua yaitu adanya disparitas di pasar tenaga kerja. Ketiga yaitu perbedaan distribusi kekayaan, sehingga komunitas yang memiliki banyak aset baik sekarang maupun masa depan akan mendorong ketimpangan tersebut. Keempat yaitu ketika terjadi goncangan, masyarakat miskin akan sangat terpuak dan pada akhirnya akan kehilangan kemampuan untuk mencari uang (World Bank).

Secara umum ada dua masalah besar yang umumnya dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau kesenjangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*). Sejumlah pengambil kebijakan telah bergantung pada gagasan bahwa ada efek perembesan ke bawah (*trickle down effect*) selama proses pembangunan.

Berdasarkan keyakinan ini, strategi pembangunan yang digunakan akan lebih berkonsentrasi pada cara mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam waktu yang relatif singkat. Untuk mencapai tujuan tersebut, jalan pintas yang diambil berdasarkan pengalaman masa lalu meskipun akan menyebabkan konsekuensi negatif adalah pusat pembangunan ekonomi nasional dan daerah dimulai di wilayah yang telah memiliki infrastruktur lebih memadai terutama di Pulau Jawa.

Provinsi Jawa Timur didirikan pada tanggal 4 Maret 1950 berdasarkan dasar hukum UU No. 2 Tahun 1950. Ibukota Provinsi Jawa Timur adalah Kota Surabaya yang juga merupakan Kota Terbesar kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta. Secara administratif Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota, dengan Kota Surabaya sebagai ibukota provinsi. Hal ini menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia. Provinsi Jawa Timur terbagi dalam 5 Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil): Bakorwil I Madiun, Bakorwil II Bojonegoro, Bakorwil III Malang, Bakorwil IV Pamekasan, dan Bakorwil V Jember.

Provinsi Jawa Timur menjadi pusat pertumbuhan industri maupun perdagangan karena mempunyai posisi yang strategis di bidang industri sebab diapit oleh dua provinsi besar yaitu Jawa Tengah dan Bali. Provinsi Jawa Timur juga memiliki sejumlah industri besar, di antaranya galangan kapal terbesar di Indonesia PT PAL di Surabaya, perusahaan perlengkapan tempur PT Pindad di Malang, perusahaan kereta api terbesar di Asia Tenggara PT INKA di Madiun, perusahaan kertas (PT Tjiwi Kimia di Tarik-Sidoarjo dan PT Leces di Probolinggo), pabrik rokok (Wismilak di Surabaya, Gudang Garam di Kediri, Sampoerna di

Surabaya dan Pasuruan, serta Bentoel di Malang). Di Gresik, ada PT Petrokimia Gresik dan Semen Gresik. Di Tuban, ada pabrik semen terbesar di Indonesia, Semen Indonesia (sebelumnya Semen Gresik), Dynamix (sebelumnya Semen Holcim), dan Kawasan Kilang Petrokimia.

12 kawasan industri estate telah ditetapkan oleh pemerintah. Di antaranya yaitu Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) di Surabaya, Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER) di Kabupaten Pasuruan, Kawasan Industri Nganjuk (KING) di Nganjuk, Madiun Industrial Estate Balerejo (MIEB) di Madiun, Ngoro Industrial Park (NIP) di Mojokerto, Kawasan Industri Jabon di Sidoarjo, dan Lamongan Integrated Shorebase (LIS) di Lamongan. Sentra industri kecil dapat ditemukan di semua kabupaten/kota, dan beberapa di antaranya telah mencapai ekspor. Salah satu bisnis kecil yang terkenal adalah pembuatan tas dan sepatu dari kulit yang berada di Tanggulangin, Sidoarjo.

Meskipun begitu Jawa Timur juga tidak lepas dari permasalahan ketimpangan pendapatan. Sebab ketimpangan timbul karena tidak adanya pemerataan dalam pembangunan ekonomi. Ketidakmerataan ini disebabkan karena adanya perbedaan antar wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat merupakan faktor penyebab ketimpangan pendapatan. Dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi, distribusi akan lebih tidak seragam, yang pada akhirnya akan menyebabkan perbedaan antara mereka yang kaya dan miskin. Rasio Gini adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan di Indonesia. Tingkat ketimpangan pendapatan di suatu daerah dapat dihitung dengan menggunakan rasio gini. Kriteria rasio gini

mendasarkan pada nilai dari rasio gini yang berkisar antara 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan bahwa pendapatan secara keseluruhan didistribusikan secara merata ke seluruh unit masyarakat (*perfect equality*), sementara nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna, yang berarti bahwa satu kelompok memiliki semua dan yang lainnya tidak memiliki apa-apa (*perfect inequality*).

Kajian tentang pemerataan pendapatan dalam islam merupakan suatu sistem yang berbeda dengan sistem yang berlaku, yang mana memiliki akar syariah yang menjadi sumber pandangan dunia sekaligus tujuan dan strateginya. Yang mana bukan semata-mata bersifat materi justru didasarkan pada konsep kesejahteraan untuk manusia dan kehidupan yang baik dan memberikan nilai yang penting bagi persaudaraan keadilan sosial-ekonomi dengan kepuasan yang seimbang. Yang mana tertera pada Q.S an Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۭ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

artinya: “Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik pria maupun wanita dalam keadaan beriman, maka niscaya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri akhir dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur tahun 2022 yang diukur dengan Rasio Gini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014, hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk semakin membaik. Berdasarkan laporan tahunan BPS, Rasio Gini di Pulau Jawa dan Nasional mengalami fluktuasi data. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Rasio Gini di Pulau Jawa dan Nasional Tahun 2014 - 2022

Provinsi	Rasio Gini								
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DKI Jakarta	0,436	0,421	0,397	0,409	0,39	0,391	0,399	0,411	0,412
Jawa Barat	0,398	0,426	0,402	0,393	0,405	0,398	0,403	0,406	0,412
Jawa Tengah	0,388	0,382	0,357	0,365	0,357	0,358	0,362	0,368	0,366
D.I. Yogyakarta	0,435	0,42	0,425	0,44	0,422	0,428	0,434	0,436	0,459
Jawa Timur	0,403	0,403	0,402	0,415	0,371	0,364	0,366	0,364	0,365
Banten	0,424	0,386	0,392	0,379	0,367	0,361	0,363	0,363	0,377
Nasional	0,414	0,402	0,394	0,391	0,384	0,380	0,381	0,381	0,381

Sumber: Website BPS (diolah)

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa data rasio gini tahun 2014 hingga 2022 menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan tingkat rasio gini sebesar 0,024, Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan tingkat rasio gini sebesar 0,014, Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan tingkat rasio gini sebesar 0,022, Provinsi D.I. Yogyakarta mengalami kenaikan tingkat rasio gini sebesar 0,024, Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan tingkat rasio gini sebesar 0,038, dan Provinsi Banten mengalami penurunan tingkat rasio gini sebesar 0,047, Untuk perbandingan tingkat rasio gini di Pulau Jawa dan Nasional ini peringkat pertama yang mengalami perubahan dari tahun 2014 - 2022 ialah Provinsi D.I. Yogyakarta yakni meningkat sebesar 0,024. Berbeda halnya dengan tingkat nasional yang mengalami penurunan dari tahun 2014 - 2022 sebesar 0,033. Jadi, dari keenam Provinsi diatas hanya Jawa Barat dan D.I Yogyakarta yang mengalami kenaikan rasio gini diatas gini rasio nasional.

Ada 8 hal yang menyebabkan ketimpangan distribusi di negara sedang berkembang: (1) Pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi yang menyebabkan menurunnya pendapatan per kapita. (2) Inflasi dimana pendapatan uang meningkat

tetapi tidak sebanding dengan peningkatan produksi barang. (3) Ketidakmerataan pembangunan antar daerah. (4) Investasi yang signifikan dalam proyek yang membutuhkan banyak modal menyebabkan peningkatan persentase pendapatan modal kerja dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja dan menyebabkan meningkatnya tingkat pengangguran. (5) Rendahnya mobilitas sosial. (6) Untuk melindungi golongan bisnis kapitalis, kebijakan substitusi industri impor mengakibatkan kenaikan harga barang hasil industri. (7) Nilai tukar negara-negara sedang berkembang menurun selama perdagangan dengan negara-negara maju karena permintaan negara-negara maju terhadap produk ekspor negara-negara sedang berkembang yang tidak stabil. (8) Hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

Pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila suatu wilayah/daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan taraf hidup masyarakat secara merata atau yang lebih dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tingkat produktivitas penduduk akan dipengaruhi oleh rendah atau tingginya IPM, jika IPM turun maka tingkat produktivitas penduduk juga akan turun dan penurunan produktivitas akan berdampak pada penurunan pendapatan, sebaliknya, tingkat produktivitas penduduk akan meningkat seiring dengan peningkatan IPM, yang kemudian akan menghasilkan peningkatan pendapatan.



Sumber: BPS Jawa Timur (diolah)

Gambar 1.1
Perkembangan IPM di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2022

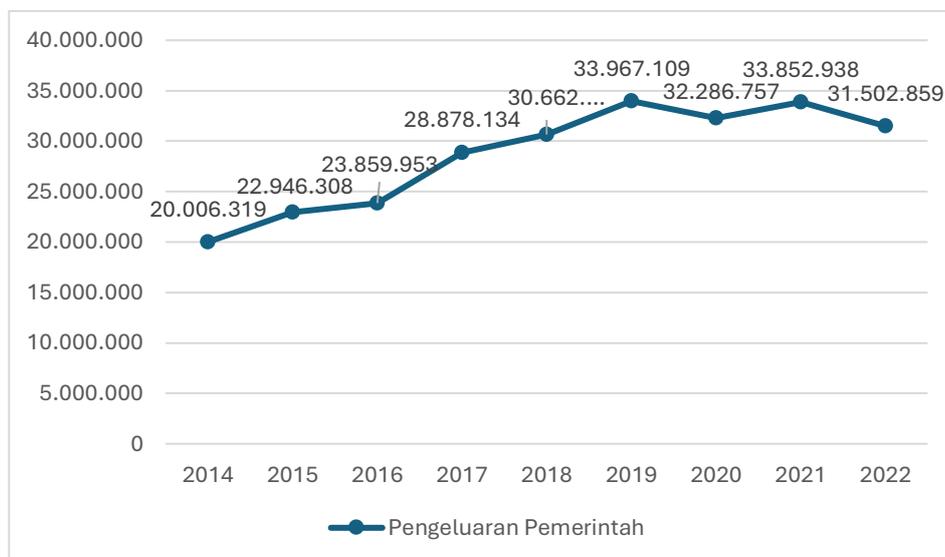
Berdasarkan Gambar 1.1 perkembangan IPM meningkat setiap tahunnya di Jawa Timur walaupun tidak terlalu banyak. Pada tahun 2020 IPM di Jawa Timur mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,21 dan menjadi 71,71 yang mana tergolong sedikit daripada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 mulai meningkat lagi sebesar 0,43 dan menjadi 72,14. Dan pada tahun 2022 meningkat lagi sebesar 0,61 dan menjadi 72,75.

Uraian di atas menunjukkan bahwa angka dan indikator pembentuk IPM di Provinsi Jawa Timur telah meningkat dalam sembilan tahun terakhir. Karena peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, tidak menutup kemungkinan bahwa IPM di Provinsi Jawa Timur akan naik ke kategori tinggi dalam beberapa tahun ke depan.

Penggunaan sumber daya ekonomi yang dimiliki dan atau dikuasai secara langsung oleh pemerintah dan secara tidak langsung dimiliki oleh masyarakat termasuk dalam kategori pengeluaran pemerintah. Provinsi Jawa Timur merupakan

salah satu provinsi di Indonesia yang sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan daerah. Pembangunan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan perputaran ekonomi, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan daerah yang akan memungkinkan lebih banyak peluang kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti yang ditunjukkan oleh PDRB yang terus meningkat dalam jangka panjang.

Peran pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan sumber-sumber pembangunan yang potensial harus disesuaikan dengan kekuatan keuangan masing-masing daerah agar perubahan ekonomi dapat berjalan sesuai rencana. Untuk memenuhi kebutuhan ini, peran pengeluaran pemerintah sebagai sarana pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut harus direncanakan secara cermat. Tujuan ini pada akhirnya harus memungkinkan pertumbuhan ekonomi daerah.

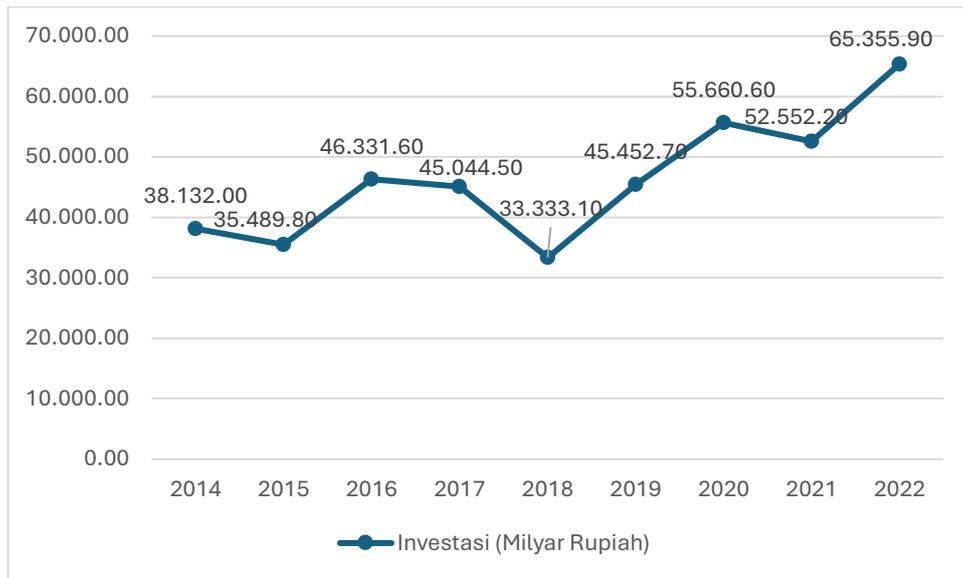


Sumber: BPS Jawa Timur (diolah)

Gambar 1.2
Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2022

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat dilihat perkembangan pengeluaran di wilayah Jawa Timur pada tahun 2014 - 2019 mengalami peningkatan, pada tahun 2020 mulai turun dan naik lagi pada tahun 2021, kemudian mengalami penurunan lagi pada tahun 2022. Pemerintah daerah dapat melakukan perubahan pengeluaran sebagai upaya untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan yang terjadi. Perkembangan dapat menyebabkan peningkatan anggaran pendapatan maupun pengeluaran. Pengeluaran pemerintah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah, yang akan berdampak pada pembangunan daerah tersebut. Jika pengeluaran pemerintah terus meningkat maka pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut akan meningkat serta terciptanya pembangunan di daerah tersebut. Jika pembangunan di daerah tersebut tinggi maka akan sulit untuk menemukan ketimpangan pendapatan di seluruh daerah tersebut, sebaliknya jika pembangunan di daerah tersebut rendah dan terpusat di satu daerah, maka ketimpangan pendapatan di daerah tersebut akan muncul.

Dalam proses pembangunan ekonomi diperlukan juga dukungan investasi yang merupakan salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi. Investasi yang dihasilkan dari kegiatan penanaman modal akan terus menambah stok modal (*capital stock*). Selain itu, peningkatan modal stok akan meningkatkan produktivitas, kapasitas produksi, dan kualitas produk yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan energi kerja.

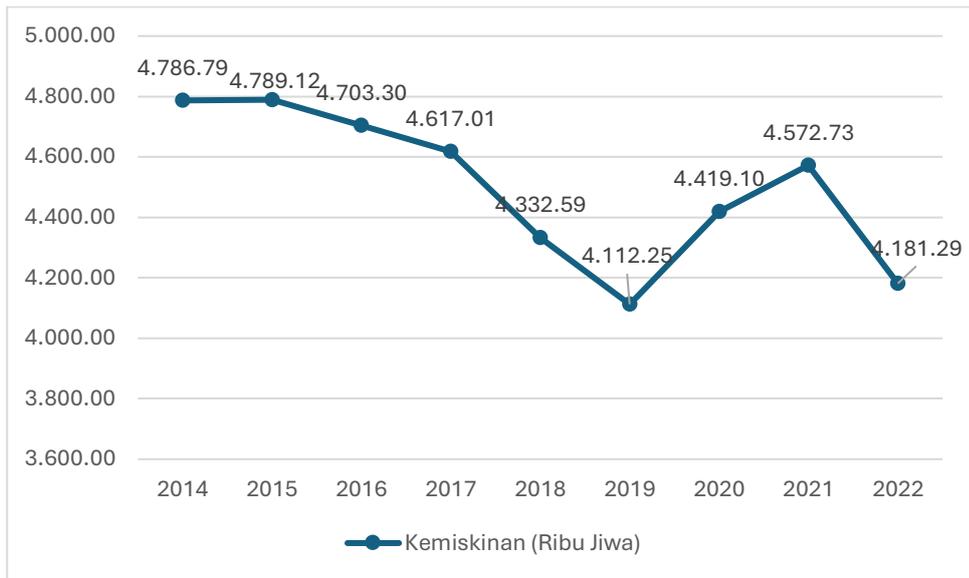


Sumber: BPS Jawa Timur (diolah)

Gambar 1.3
Perkembangan Investasi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2022

Berdasarkan Gambar 1.3 dapat dilihat bahwa perkembangan Investasi asing di Jawa Timur mengalami kenaikan pada tahun 2020 tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan dan naik lagi pada tahun 2022. Hal ini berarti Jawa Timur termasuk ke dalam provinsi yang dilihat oleh negara lain sebagai wilayah yang memiliki potensi untuk berinvestasi meskipun pada tahun 2021 sempat mengalami penurunan tapi masih lebih baik dibandingkan tahun 2014-2019.

Selain IPM, pengeluaran pemerintah dan investasi, tingkat kemiskinan yang terjadi di suatu daerah juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan dan tolak ukur keberhasilan pembangunan. Kemiskinan yang rendah menunjukkan bahwa suatu daerah telah berhasil mewujudkan masyarakat yang sejahtera.



Sumber: BPS Jawa Timur (diolah)

Gambar 1.4
Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2022

Berdasarkan Gambar 1.4 dapat dilihat bahwa Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur juga terlihat mengalami fluktuasi selama kurun waktu 2014 - 2022. Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 4.786,79 ribu jiwa. Kemudian pada tahun 2015 sampai 2019 kemiskinan di Jawa Timur kembali mengalami penurunan yang signifikan menjadi 4.112,25 ribu jiwa. Penurunan ini disebabkan karena bertambahnya kesempatan kerja di beberapa Kabupaten yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan berkurangnya kemiskinan. Kemudian pada tahun 2020 sampai 2021 tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur kembali mengalami peningkatan. Peningkatan ini dikarenakan terjadi peningkatan jumlah pengangguran di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Lalu pada tahun 2022 kemiskinan di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan menjadi 4.181,29.

Adanya perbedaan tingkat indeks pembangunan manusia (IPM), pengeluaran pemerintah, investasi, dan kemiskinan akan menyebabkan permasalahan ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, berdasarkan fenomena gap yang telah diinterpretasikan, dapat disimpulkan bahwa tidak semua peristiwa yang diamati sesuai dengan teori saat ini. Temuan ini didukung oleh gap penelitian pada penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Pramana et al. (2023) menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sedangkan hasil penelitian Rachmawatie & Prakoso (2023) menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Selain itu, penelitian mengenai dampak pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan menunjukkan hasil yang sama. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Prannisa et al. (2022) yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Dan hasil penelitian Ghifara et al. (2022) menyatakan bahwasannya belanja pemerintah juga memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Variabel investasi juga memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jamada et al. (2022) investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sedangkan penelitian Ishak et al. (2018) menunjukkan hasil bahwa investasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Kemudian juga dilakukan penelitian mengenai pengaruh kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Safrita et al. (2021) hasil dalam penelitiannya mengidentifikasi bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sedangkan hasil penelitian Kunenengan et al. (2023) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Mengingat fenomena *research gap* yang disebutkan di atas masih terdapat inkonsistensi. Oleh karena itu, penulis mengambil topik penelitian tentang ketimpangan pendapatan. Yang mana perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah variabel independen (X) yang digunakan yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Pengeluaran Pemerintah, Investasi dan Kemiskinan serta lokasi penelitian yang berbeda yaitu di Provinsi Jawa Timur. Keterkaitan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terdapat penambahan variabel bebas dan variabel terikat yang sama sehingga dapat dijadikan referensi bagi peneliti untuk membandingkan hasil penelitian, kemudian diharapkan dengan adanya kesamaan variabel dapat membantu mendukung hasil dari penelitian.

Dari uraian diatas, maka penulis merasa terdorong untuk mendalami dan meneliti tentang ketimpangan pendapatan dengan menjelaskan secara umum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Kiranya pula penulis melakukan penelitian yang mengambil judul **“ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN PENDAPATAN DI JAWA TIMUR (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2014-2022)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berguna untuk mempermudah dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain:

1. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur?
3. Bagaimana pengaruh investasi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur?
4. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan ini berguna untuk menyebutkan secara spesifik maksud dari penelitian baik yang utama maupun tambahan dan dikemukakan secara jelas. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka hasil yang akan dicapai, antara lain:

1. Untuk menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk menganalisis pengaruh investasi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur.

4. Untuk menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pihak, adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai saran masukan dan tambahan pemikiran dalam mengatasi ketimpangan pendapatan yang ada di Provinsi Jawa Timur sehingga mempermudah dalam mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan tersebut.

- b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran dan pengaplikasian materi yang telah dipelajari pada saat kuliah dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh indeks pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah, investasi dan kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur.

- c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan informasi serta referensi untuk pihak yang melakukan studi terkait mengenai pengaruh indeks pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah, investasi dan kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur.